

PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DUKUH MENANGGAL SURABAYA DALAM PILKADA LANGSUNG DI KOTA SURABAYA

A. Qomaru Zaman

Dosen Prodi PPKn FKIP UNIPA Surabaya
qomarpkn@gmail.com

Abstract

This research reveals a problem of perception and participation of Dukuh Menanggal Surabaya citizen in the direct election of regional heads in Surabaya in 2010. The research objective was to assess the perceptions and participation of citizens in the form of views and forms of citizen action and community leaders both formal and non-formal education, in the face of direct election implementation in Surabaya. In addition, to assess the relationship between perception and participation of residents with social, economic and cultural

This type of research includes descriptive qualitative research. Because the focus of research has been determined in advance, then the strategy of this research includes case studies spikes (embedded case study research). The data in this study is largely qualitative data extracted from the resource persons is 40 people, and from the archives/documents such as journals, newspapers and magazines. The selection of resource persons (sampling) using purposive sampling or criterion-based selection. The data were collected by in-depth interview techniques (depth Interviewing) and recorded documents (content analysis). To obtain accurate data the validity of the data used technique known as triangulation. While the data analysis with interactive analysis techniques

From the data analysis it can be concluded:

1. Perception of Dukuh Menanggal Surabaya citizens against direct election in Surabaya. Generally they are positive/good or agree. However, there are some who see negatively or less agree, and even doubt/don't use the right to vote the direct election of Surabaya.
2. These are some of forms of direct citizen participation in Election, among others: the very high participation in election and determination of voters list on election participation is low, while participation at direct elections included in the category of less participation (low participation).
3. Perception and participation of Dukuh Menanggal Surabaya citizen in the election in Surabaya is very closely linked to the social, economic and cultural development. Both those who agree or are opposed and are hesitant to the direct general election have backgrounds in different social, economic or cultural.

Keyword: Perception, participation, and direct election

I. Pendahuluan

Otonomi Daerah (Otodada) membawa dampak yang sangat luas terhadap berkembangnya demokrasi di Indonesia. Otodada juga membawa harapan besar untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran suatu daerah melalui pemilihan kepala daerah (PILKADA) secara langsung. Dalam pelaksanaan PILKADA secara langsung ini rakyat dapat menentukan pilihannya sendiri dengan cara memilih nama calon kepala daerah (menconteng nama kepala daerah) secara langsung. Hal ini sangat berbeda

dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bagaimanapun hal ini merupakan konsekuensi logis dari berlakunya Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1947 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Sebagaimana diketahui bahwa, setiap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah penyelenggaranya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

sebagaimana tercantum di dalam Undang – Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah BAB IV bagian kedelapan pasal 57.

Pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis melalui keterlibatan partai politik dalam menentukan dan mengendalikan pemilihan kepala daerah, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala daerah benar-benar bersifat murni dan konsekuen dimana setiap pasangan calon tersebut diajukan oleh partai politik. Harapan positif dari partai politik adalah optimalisasi fungsi dan peran partai politik itu sendiri dalam membawa masyarakat menuju kearah yang lebih baik dan sejahtera serta demokratis. Pemilihan Kepala Daerah juga merupakan salah satu sarana pendidikan politik bagi masyarakat yang bersifat langsung dan terbuka, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

Begitu juga yang terjadi dalam PILKADA Kota Surabaya tahun 2010, penyelenggaraan Pemilihan Walikota Tahun 2010 dilakukan secara demokratis dengan menggelar pemilihan langsung untuk memilih calon walikota dan wakil walikota. Menurut data Panwas Pilkada Surabaya mencatat DPT Pilkada Surabaya 2010 sebanyak 2.142.899 pemilih yang merupakan hak suara yang harus mampu diaspirasikan untuk memilih calon-calon pemimpin di Kota Surabaya. Oleh karena itu, peran masyarakat menjadi sangat penting dalam mewujudkan suatu Pemilu yang berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. (www.KPUKota-Surabaya.co.id diunduh 16/12/2011)

Masyarakat menjadi bagian terpenting dari pesta demokrasi tersebut, karena partisipasinya/perannya untuk hadir dan melaksanakan pemilihan merupakan modal keberhasilan dari penyelenggaraan pemilu. Partisipasi masyarakat dibutuhkan sejak tahapan pemilu dari penyeleksian DPS (Daftar Pemilih Sementara), tahapan kampanye, tahapan pemilihan serta pemantauan terhadap proses perhitungan suara.

Dalam mengembangkan partisipasi masyarakat, peran serta tokoh masyarakat baik formal maupun non-formal sangat penting peranannya, terutama dalam mempengaruhi, memberi contoh maupun menggerakkan keterlibatan seluruh warga masyarakat. Umumnya tokoh masyarakat menjadi panutan dalam segala kegiatan sehari-hari. Keberhasilan pendekatan sejak awal kepada tokoh masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Persepsi warga masyarakat terhadap program tertentu merupakan landasan utama bagi munculnya kesediaan untuk terlibat dan berperan aktif dalam pelaksanaan setiap kegiatan program tersebut. Makna positif atau negatif sebagai hasil persepsi seseorang terhadap program akan menjadi pendorong atau penghambat baginya untuk berperan dalam kegiatannya.

Partisipasi warga masyarakat dalam hal ini adalah partisipasi warga masyarakat Dukuh Menanggal Surabaya yang lebih mengarah kepada kesediaan mereka terlibat dalam penyeleksian DPS (Daftar Pemilih Sementara), tahapan kampanye, tahapan pemilihan serta pemantauan terhadap proses perhitungan suara. Partisipasi masyarakat banyak dipengaruhi oleh persepsi masyarakat itu sendiri terhadap pemilihan kepala daerah selama ini. Sedangkan persepsi masyarakat sebenarnya dipengaruhi oleh kekhususan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

Dalam kaitan dengan PILKADA Langsung di Kota Surabaya, maka partisipasi aktif warga masyarakat Dukuh Menanggal Surabaya akan sangat ditentukan oleh persepsinya terhadap program kegiatan tersebut yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi dan budaya yang khusus.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini diarahkan untuk memecahkan masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persepsi warga masyarakat Dukuh Menanggal Surabaya terhadap PILKADA Langsung Kota Surabaya?

2. Bagaimanakah bentuk-bentuk partisipasi warga masyarakat Dukuh Menanggal Surabaya dalam PILKADA Langsung Kota Surabaya?
3. Sejauh mana persepsi dan partisipasi warga masyarakat Dukuh Menanggal Surabaya berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budayanya?

Kajian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana persepsi dan partisipasi warga masyarakat Dukuh Menanggal Surabaya berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budayanya.

II. Kajian Teori

Persepsi selalu berkaitan dengan pengalaman dan tujuan seseorang pada waktu terjadinya proses persepsi. Ia merupakan tingkah laku selektif dan bertujuan (Bigge, 1984). Ia juga merupakan proses pencapaian makna. Dengan demikian pengalaman menjadi faktor yang sangat penting dan menentukan hasil persepsi.

Pengalaman budaya berperan sangat penting dalam proses kognitif, karena anggapan dan pikiran yang merupakan alat utama dalam proses kognitif selalu bersumber darinya. Pengalaman seseorang yang merupakan akumulasi dari hasil berinteraksi dengan lingkungan hidupnya setiap hari dalam masyarakat, lokasi geografisnya, latar belakang ekonomi dan politiknya, keterlibatan religiusnya, sangat menentukan persepsinya terhadap suatu kegiatan. Perbedaan pengalaman ini dapat dilihat dalam PILKADA Langsung Kota Surabaya diikuti oleh warga masyarakat Dukuh Menanggal Surabaya, antara penduduk asli, pendatang, tokoh masyarakat formal dan non formal, pemuda, dan sebagainya, memiliki persepsi yang tidak sama. Perbedaan persepsi juga mempengaruhi tingkat partisipasi warga masyarakat Dukuh Menanggal, sehingga ada yang berpartisipasi aktif, kurang aktif bahkan berpartisipasi semu.

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (KPU Kota Surabaya, 2010).

Pemilu tidak sekedar persoalan memilih dan dipilih, namun merupakan salah satu wahana pendidikan politik untuk warga negara. Tiap masa kampanye adalah masa pendidikan politik yang istimewa, lebih dari waktu lain. Salah satu tujuan pendidikan secara mendasar adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga, pendidikan apapun jenisnya tidak dapat dilepaskan dari misi tersebut.

Pendidikan politik merupakan usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan benar-benar menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal yang hendak dibangun. Sedang menurut Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, disebutkan bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsaan bernegara, (Alfian, 1986: 235). Sosialisasi politik merupakan kegiatan yang sangat menentukan dalam dalam upaya meningkatkan partisipasi politik. Sedangkan partisipasi politik dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat (Raga Manan, 2006: 47).

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sedangkan Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh Indonesia. Tugas dan wewenang Bawaslu adalah untuk mengawasi setiap kebijakan yang diambil oleh KPU, menilai dan memberikan masukan atas laporan evaluasi pelaksanaan pemilu yang dibuat KPU, dan mengawasi setiap tahapan pemilu. Pendukung penyelenggaraan pemilu.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif. (KPU Kota Surabaya, 2010)

KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilu tidak sekedar persoalan memilih dan dipilih, namun merupakan salah satu wahana pendidikan politik untuk warga negara. Menurut Safrudin (www.blogjurnalistikonline.com, 2010), pendidikan politik adalah aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi politik pada individu, meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Disamping itu, ia bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya. Pendidikan politik merupakan aktivitas yang

terus berlangsung sepanjang hidup manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang demokratis.

Pendidikan politik bagi warga Negara merupakan sesuatu yang sangat penting. Tiap masa kampanye adalah masa pendidikan politik yang istimewa, lebih dari waktu lain. Salah satu tujuan pendidikan secara mendasar adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga, pendidikan apapun jenisnya tidak dapat dilepaskan dari misi tersebut.

Dengan demikian pendidikan politik memiliki tiga tujuan: membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, serta bertujuan untuk membentuk kemampuan dalam berpartisipasi politik pada individu, agar individu menjadi partisipan politik dalam bentuk yang positif. Pembentukan kepribadian politik dapat dilakukan melalui metode secara tidak langsung yaitu sosialisasi dan pelatihan, serta metode yang bersifat langsung yaitu pengajaran politik melalui institusi pendidikan. Untuk menumbuhkan kesadaran politik ditempuh dengan dialog dan pengajaran instruktif.

Adapun partisipasi politik, terwujud dalam keikutsertaan individu secara sukarela dalam kehidupan politik masyarakatnya. Jika hal-hal tersebut dapat terbentuk dalam jiwa setiap warga negara yang ditegakkan dengan pilar-pilar ideologi, spiritual, moral dan intelektual, maka diharapkan bangsa ini akan menjadi bangsa yang berkarakter, dan dapat mengantarkan rakyat Indonesia menjadi bangsa yang maju dan besar (Duverger, 2005: 52)

Sedangkan pendukung utama pendidikan politik adalah sebagai berikut:

1. Partai Politik (parpol), salah satu fungsi parpol menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sedangkan Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh Indonesia.
3. Pers, mempunyai peran yang sangat strategis dalam pendidikan politik. Media sebagai sumber terbesar sarana membaca mempunyai cara tersendiri untuk memberikan pendidikan dan membentuk pemikiran masyarakat atau memberikan pembelajaran politik pada masyarakat. Misalnya dalam menyebar luaskan informasi (sosialisasi), tentang proses dan ketentuan pemilu, sistem yang akan digunakan, kinerja peserta pemilu, serta hak dan kewajiban pemilih. Melalui peran tersebut, pers ikut aktif memberikan pendidikan politik, yaitu membantu masyarakat menentukan pilihan politik. Menurut Amal (2008), dapat dikatakan bahwa harapan terbesar bagi pendidikan politik bagi warga negara sebenarnya diharapkan dari pers. Pers juga mempunyai peranan dalam pelaksanaan pemilu dalam hal melaporkan praktik-praktik kecurangan yang dilakukan sejak tahap pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara. Dalam fungsinya sebagai sarana sosialisasi dan informasi, pers diharapkan dapat ikut memberikan pendidikan pada masyarakat untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil serta damai.
- 4) Lembaga Pendidikan
Secara moral, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab atas persoalan-persoalan politik bangsanya, dengan membenahi etika politik bangsa. Menurut pasal 3 Peraturan Menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang Pembinaan Kesiswaan, materi pembinaan kesiswaan meliputi demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan

hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural. Dunia pendidikan, harus dapat berposisi sebagai penyegaran pandangan, wawasan dan nuansa politik agar generasi muda tidak apatis terhadap persoalan politik. Diperlukan pembenahan etika politik sejak dini melalui pendidikan, karena pada dasarnya pendidikan adalah bekal masa depan generasi muda. Dengan pengetahuan mendasar tersebut peserta didik tidak hanya diharapkan menjatuhkan pilihan yang benar, namun juga menjadi pelaku politik yang baik. Jika menjadi politikus nantinya, dapat menjadi politikus-politikus yang beretika. Peran perguruan tinggi dalam pendidikan politik menjadi sangat strategis karena ia dapat menjadi sebagai intermediasi sebagaimana halnya pers. Walaupun tetap saja memiliki keterbatasan karena ia juga harus bekerja menggunakan pers. Sehingga diperlukan terobosan perguruan tinggi melakukan pendidikan politik melalui pendampingan, agar masyarakat lebih kritis mensikapi kompetisi politik secara baik dan secara kuat, apalagi bagi masyarakat yang akan memperjuangkan kepentingan mereka sebagai kandidat.

5) Masyarakat

Pendidikan politik bagi warga negara perlu dilakukan untuk menentukan pilihan yang cerdas. Namun pendidikan politik menjadi persoalan ketika hanya dilakukan oleh lembaga formal ataupun partai politik. Seharusnya masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), juga melakukan pendidikan politik dengan melakukan pembelajaran secara horizontal (*horizontal learning*), untuk mengetahui sejauh mana mereka mengetahui secara cukup kandidat-kandidat yang muncul untuk dapat mewakili aspirasi mereka.

Di tengah munculnya apatisisme masyarakat terhadap pemilu, munculnya fenomena golongan putih (golput), juga memunculkan inisiatif-inisiatif masyarakat untuk mengorganisir dirinya dan masyarakat lain dengan melakukan diskusi dan dialog

secara horisontal, sehingga mereka memiliki kriteria yang lebih jelas mengenai apa yang mereka inginkan. Pemilu dapat menjadi momentum yang berarti bagi masyarakat untuk melakukan proses pembelajaran horizontal antaranggotanya.

Informasi dasar yang harus diperoleh masyarakat diantaranya adalah rekam jejak (*track record*) dari para kandidat, Misalnya apakah kandidat pernah melakukan pelanggaran HAM, pernah melakukan korupsi atau melakukan tindak pelanggaran lingkungan. Hal ini hanya bisa didapatkan melalui proses *horizontal learning*.

III. Metodologi Penelitian

Berbagai hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang akan digunakan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Dukuh Menanggal (Kelurahan Dukuh Menanggal) kota Surabaya Propinsi Jawa Timur. Kawasan Dukuh Menanggal Surabaya dipilih dengan alasan bahwa kawasan Dukuh Menanggal yang terletak di Surabaya Selatan, berbatasan dengan Sidoarjo merupakan kawasan pinggir kota Surabaya, sehingga kawasan ini bisa jadi sedikit terabaikan dalam proses sosialisasi PILKADA Langsung. Hal ini merupakan sesuatu yang menarik untuk diteliti.

B. Bentuk/Strategi Penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan, yang lebih menekankan pada proses dan makna (persepsi dan partisipasi) maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini mampu menangkap dan mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi yang teliti dan penuh nuansa. Karena permasalahan dan fokus penelitian sudah ditentukan dalam proposal, maka jenis strategi penelitian kasus ini secara lebih khusus dapat disebut sebagai studi kasus terpancang (*embedded case study research*).

C. Sumber Data

Data atau informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini sebagian besar berupa data kualitatif. Informasi tersebut digali dari berbagai sumber data. Sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Informan atau nara sumber, yang terdiri dari para tokoh masyarakat (formal maupun non-formal), pemuda, penduduk asli maupun pendatang yang tinggal di Dukuh Menanggal.
2. Tempat dan peristiwa/aktivitas pelaksanaan PILKADA Langsung di Kelurahan Dukuh Menanggal Surabaya.
3. Arsip dan dokumen, dalam hal ini lebih mengarah kepada dokumen resmi mengenai pelaksanaan kegiatan PILKADA Langsung Kota Surabaya tahun 2010 serta surat kabar dan majalah yang memuat berita tentang permasalahan tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan juga jenis sumber data yang dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah:

1. Wawancara mendalam (*in-depth interviewing*)

Wawancara jenis ini bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur ketat, tidak dalam suasana formal dan bisa dilakukan berulang pada informan yang sama. Pertanyaan yang diajukan bisa semakin terfokus sehingga informasi yang dikumpulkan bisa semakin terinci dan mendalam. Kelonggaran dan kelenturan cara ini mampu mengorek kejujuran informan untuk memberikan informasi yang sebenarnya, terutama yang berkaitan dengan persepsi dan partisipasi warga masyarakat Dukuh Menanggal dalam pemilihan umum langsung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya. Teknik wawancara ini dilakukan terhadap semua informan. Masalah utama yang ditanyakan adalah berkait

dengan partisipasi masyarakat(memilih), jumlah DPT (daftar Pemilih Tetap), tahapan Pemilu dan Hasil Pemilu Kota Surabaya.

2. Observasi langsung

Dalam penelitian kualitatif observasi ini sering disebut observasi berperan pasif(Spradley, 1980). Observasi langsung dilaksanakan dengan cara formal maupun informal, untuk mengamati berbagai kegiatan dan peristiwa yang terjadi di Dukuh Menanggal. Paling tidak untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, terkait dengan peran masyarakat dalam pelaksanaan pemilukada, yaitu berkaitan dengan DPT, Golput serta pelanggaran kampanye. Disamping itu juga mencari data dengan datang langsung ke PPS Dukuh Menanggal Surabaya yang merupakan bagian dari struktur kerja Komisi Pemilihan Umum ditingkat Kelurahan/desa.

3. Mencatat Dokumen(Content Analysis)

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan arsip yang memuat tentang pemilihan umum langsung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, termasuk berkas-berkas pelaksanaan perhitungan suara yang disebut blangko C4 atau berita acara pemilu.

E. Teknik Cuplikan (Sampling)

Untuk mendapatkan data/informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka dalam penelitian ini digunakan teknik cuplikan yang bersifat selektif dengan menggunakan pertimbangan berdasarkan konsep teoritis yang dipakai, keingintahuan pribadi peneliti, karakteristik empirisnya, dan sebagainya. Dengan demikian cuplikan yang digunakan dalam penelitian ini lebih bersifat "*purposive sampling*", atau lebih tepat disebut dengan "*criterion-based-selection*" (Goetz & LeComte, 1984).

Dalam teknik cuplikan ini, dipilih informan yang dipandang paling tahu dan bisa dipercaya sehingga dapat menjadi sumber data yang mantap. Informan yang dipilih tersebut diharapkan dapat menunjuk informan lain yang lebih tahu, sehingga penggalian data dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan (Patton, 1984).

F. Validitas Data

Agar data/informasi yang diperoleh dapat dijamin kebenarannya maka dalam penelitian digunakan beraneka ragam data yang bersifat *multiside*(Miles dan Huberman, 1984: 132). Untuk menjamin kebenaran data/informasi digunakan validitas data yang dikenal dengan teknik triangulasi(Patton, 1990). Berbagai data yang diperoleh diseleksi dan diuji dengan data yang lain baik dari sumber yang sama maupun sumber yang berbeda. Dengan cara demikian diharapkan data yang diperoleh saling melengkapi, sehingga dapat menggambarkan realitas yang sebenarnya.

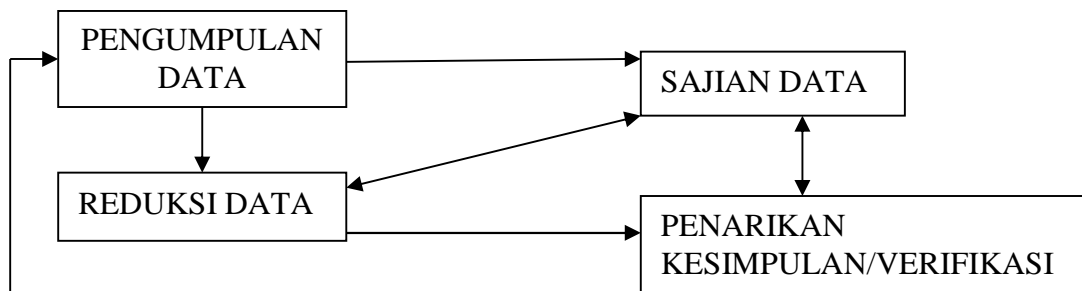
G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif(Miles dan Huberman, 1984:79). Dalam model analisis yang demikian ini terdapat empat komponen yang saling berinteraksi, yakni:

1. pengumpulan data,
2. reduksi data,
3. sajian data,
4. penarikan kesimpulan/verifikasi.

Apabila dirasakan dari salah satu atau dua atau bahkan ketiganya masih ada sesuatu yang penting untuk dikaji, namun sumber yang tersedia terbatas, maka akan dapat dicari informasi baru sehingga sesuatu yang dianggap penting akhirnya menjadi jelas. Oleh karena itu proses ini akan berputar menjadi sebuah siklus hingga kesimpulan yang valid diperoleh.

Mekanisme kerja dari analisis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Persepsi warga masyarakat Dukuh Menanggal Surabaya terhadap Pemilukada Langsung Kota Surabaya

Keragaman latar belakang masyarakat Dukuh Menanggal dalam kenyataannya membawa pengaruh yang beragam pula dalam menanggapi permasalahan yang mereka hadapi, termasuk masalah persepsi terhadap pemilukada Kota Surabaya.

Persepsi warga masyarakat Dukuh Menanggal Surabaya terhadap pemilukada Kota Surabaya. secara umum mereka bersikap positif/baik atau setuju. Namun tidak sedikit pula yang memandang negative atau kurang setuju dengan pemilukada Kota Surabaya. tersebut. Perbedaan persepsi ini tidak lepas dari pengalaman masyarakat selama ini, bahwa siapapun yang menjadi pemimpin Surabaya tidak banyak memberi pengaruh kepada penghidupan masyarakat Dukuh Menanggal.

Perbedaan persepsi masyarakat Dukuh Menanggal Surabaya ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu bersikap positif, bersikap negatif, dan bersikap ragu-ragu (Golongan Putih/GOLPUT). Sekali lagi bahwa perbedaan persepsi itu sangat wajar dilihat dari beragamnya warga Kelurahan Dukuh Menanggal Surabaya. Secara umum warga yang memiliki persepsi positif terdiri dari para penduduk tetap, yang mapan secara ekonomis, para tokoh masyarakat formal (lurah dan perangkat desa, Ketua RW, pegawai negeri dan swasta dan sebagainya),

pemuda, serta warga masyarakat tetap yang berpendidikan. Alasannya cukup rasional, pemilukada langsung merupakan manifestasi/perwujudan dari demokrasi kerakyatan. Pilkada langsung memberi kebebasan kepada warga masyarakat untuk dapat memilih maupun dipilih. Pemilukada langsung merupakan kemajuan dalam berdemokrasi yang luar biasa di Indonesia. Periode sebelumnya peristiwa pilkada langsung oleh rakyat terbilang mustahil. Kecuali hanya dilakukan ketika pemilihan kepala desa.

Warga yang berpersepsi positif juga menyatakan bahwa pilkada langsung memberi kesempatan kepada warga untuk dapat menilai para calon pemimpin secara langsung, bukan lagi seperti "membeli kucing dalam karung", yaitu memilih tetapi tidak tahu siapa yang dipilih.

Warga yang berpersepsi negatif kebanyakan para orang tua, penduduk yang indeks/kontrak, pedagang yang belum menetap, dan sebagian tokoh agama di Dukuh Menanggal. Alasannya juga sederhana bahwa pemilukada langsung tidak berbeda dengan sebelumnya, uanglah yang akan berbicara. Kelompok ini agak apatis karena *money politik* tetap akan menjadi penentu. Mereka juga tidak mengenal secara baik bahkan merasa asing dengan kelima calon wali kota dan calon wakil wali kota, sehingga mereka tidak bisa menentukan pilihannya.

Para orang tua dan sebagian tokoh agama juga kurang menyetujui atau khawatir bahwa para tokoh sekulerlah yang akan akan memenangi pemilukada langsung. Para tokoh

agama menyatakan bahwa kelompok aboge/abangan yang bernaung dalam partai politik nasionalis berpeluang besar untuk memenangi pemilu langsung. Sementara kelompok agama akan cenderung terpinggirkan.

Sedangkan kelompok ketiga adalah kelompok yang termasuk Golput, adalah campuran yang terdiri dari para pedagang yang belum mapan, tukang parkir, tukang becak, sebagian mahasiswa. Alasannya tidak memilih adalah lebih pada alasan ekonomi, yakni enggan meninggalkan pekerjaannya, takut tidak mendapatkan penghasilan pada hari H tersebut. Ada pula yang beralasan bahwa kebanyakan pemimpin tidak menepati janji/ingkar janji.

B. Bentuk-bentuk partisipasi warga masyarakat Dukuh Menanggal dalam pemilu langsung Kota Surabaya.

Perbedaan persepsi yang berhasil direkam dalam penelitian ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap bentuk-

bentuk tindakan/partisipasi warga. Hal ini dapat dilihat bahwa tiga kategori persepsi di atas menjadi patokan utama dalam bertindak/berpartisipasi terhadap pemilu Kota Surabaya.

a. Partisipasi Masyarakat dalam Penetapan DPT

Partisipasi warga Kelurahan Dukuh Menanggal dalam kaitannya dengan penetapan DPT adalah membantu pelaksanaan coklit atau verifikasi data yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (P2DP). Partisipasi yang diberikan antara lain memberikan informasi yang diperlukan seperti; nama ganda, usia di bawah ketentuan, pindah alamat, meninggal dunia, alamat dan kelengkapan keluarga yang memiliki, hak pilih dan sebagainya. Dari pelaksanaan coklit ini maka data yang dihasilkan oleh PPS Kelurahan Dukuh Menanggal untuk Daftar Pemilih Tetap dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Perbandingan Data Penduduk Dari DPS Menjadi DPT

No	DPS			DPT		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	3.251	3.298	6.549	3.135	3.209	6.344
			Selisih : 205 orang			

Hasil gambaran partisipasi masyarakat Kelurahan Dukuh Menanggal terhadap penyeleksian Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam kategori sangat tinggi, hampir seluruhnya berpartisipasi. Hal ini ditunjukkan bahwa hasil kevalitan data dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 96,9%.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Kampanye

Kampanye merupakan faktor terpenting dalam pemilu, karena seperti diamanatkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Paragraf Ketiga pasal 75 bahwa Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggara pemilihan. Pelaksanaan kampanye merupakan sosialisasi calon untuk

menyampaikan visi dan misi jika terpilih jadi seorang pimpinan. Berdasarkan dokumentasi PPS, pilkada langsung Kota Surabaya diikuti oleh 5 pasang calon wali kota(cawali) dan calon wakil wali kota (wawali), yaitu:

- 1).Pasangan BF Sutadi-Maslan Mansyur, diusung oleh partai PKB-Gerindra.
- 2).Pasangan Arif Afandi-Adies Kadir, di usung oleh partai Demokrat-Golkar.
- 3).Pasangan Tri Risma Harini-Bambang Dwi Hartono yang diusung PDI Perjuangan.
- 4).Pasangan Fandi Utomo-Yulius Bustami, diusung partai PKS, PKNU, PPP.
- 5).Pasangan Fitrajaja Purnomo-Naen Suryono, diusung dari Tim Independen.

Berdasarkan dokumentasi PPS tentang jadwal kampanye yang dilaksanakan oleh

masing-masing pasangan calon untuk Kelurahan Dukuh Menanggal sebagai berikut:

1. Pasangan BF Sutadi-Maslan Mansyur yang diusung partai PKB-Gerindra dijadwalkan kampanye pada tanggal 17 Mei 2010
2. Pasangan Arif Afandi-Adies Kadir yang di usung partai Demokrat-Golkar dijadwalkan kampanye tanggal 20 Mei 2010
3. Pasangan Tri Risma Harini-Bambang Dwi Hartono yang diusung partai PDI Perjuangan dijadwalkan kampanye tanggal 25 Mei 2010
4. Pasangan Fandi Utomo-Yulius Bustami yang diusung partai PKS, PKNU, PPP, PDS dijadwalkan kampanye tanggal 26 Mei 2010
5. Pasangan Fitrajaja Purnomo-Naen Suryono yang diusung dari Tim Independen dijadwalkan kampanye pada tanggal 28 Mei 2010.

Berdasarkan data yang bersumber pada PPS Kelurahan Dukuh Menanggal Surabaya bahwa pasangan calon yang melaksanakan kampanye hanya 2 pasangan, yaitu pasangan calon nomor urut 2: Bapak Arif Affandi dan Adies Kadir yang di usung partai Demokrat dan Golkar berkampanye tanggal 20 Mei 2010 diwilayah RW. 01 Kelurahan Dukuh Menanggal. Selanjutnya pasangan kedua yang ikut kampanye adalah pasangan nomor urut 3 yaitu Tri Risma Harini

dan Bambang Dwi Hartono yang diusung partai PDI Perjuangan berkampanye tanggal 25 Mei 2010 diwilayah RW. 06 kelurahan Dukuh Menanggal.

Jika dipersentasekan partisipasi masyarakat serta partai politik dalam pelaksanaan kampanye hanya 40%. Suatu partisipasi yang cukup rendah.

c. Partisipasi Masyarakat dalam Pemungutan Suara

Pelaksanaan Pemungutan Suara merupakan faktor terpenting dan paling menentukan dalam pemilu, karena seperti diamanatkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Paragraf Keempat pasal 86-112 bahwa Pemungutan Suara dalam pemilu langsung diharapkan mampu dilakukan dengan langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Untuk Pemilihan walikota Surabaya pelaksanaan pemungutan Suara dilakukan pada tanggal 02 Juni 2010.

Pelaksanaan pemungutan suara di Kelurahan Dukuh Menanggal dilakukan secara serentak pada tanggal 02 Juni 2010 di 14 TPS dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap secara keseluruhan adalah 6.344 orang.

Berita acara pemungutan suara dibuat beberapa rangkap untuk diberikan kepada; KPU, PPK, PPS, Saksi dan ditempel di lokasi Tempat Pemunguta Suara. Hasil berita acara tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5
Sertifikat Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Walikota Surabaya di Kelurahan Dukuh Menanggal

A	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	LK	PR	JUMLAH
No	URAIAN			
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (1a+1b)	3,135	3,209	6,344
	a. Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih.	1,449	1,620	3,069
	b. Jumlah Pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih.	1,686	1,589	3,275
2.	Jumlah pemilih dari TPS lain (dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan)	-	-	-

Berdasarkan data yang diperoleh dari berita acara yang dibuat bahwa jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih sebesar 3.069 orang dari seluruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 6.344 orang.

Perolehan hasil suara bagi masing-masing pasangan calon dapat diketahui sebagai berikut:

- 1). Pasangan BF Sutadi-Maslan Mansyur yang diusung partai PKB-Gerindra memperoleh 123 suara
- 2). Pasangan Fandi Utomo-Yulius Bustami yang diusung partai PKS, PKNU, PPP, PDS memperoleh 664 suara.
- 3). Pasangan Arif Afandi-Adies Kadir yang di usung partai Demokrat-Golkar memperoleh 1.217 suara
- 4). Pasangan Tri Risma Harini-Bambang Dwi Hartono yang diusung partai PDI Perjuangan memperoleh 785 suara
- 5). Pasangan Fitrajaja Purnomo - Naen Suryono yang diusung dari Tim Independen memperoleh 177 suara.

Hasil Pemungutan Suara menggambarkan partisipasi masyarakat Dukuh Menanggal dalam Pemilihan Walikota Surabaya, dapat dilihat bahwa kehadiran masyarakat dalam menggunakan hak pilih hanya sebesar 3.069 dari jumlah DPT yang ada. Jika dipersentasekan partisipasi masyarakat tersebut sebesar 48,4 %. Partisipasi masyarakat Kelurahan Dukuh Menanggal dalam pemilukada langsung termasuk dalam kategori kurang berpartisipasi(partisipasi rendah).

1. Persepsi dan partisipasi warga masyarakat ditinjau dari kondisi sosial, ekonomi, dan budayanya

Persepsi dan partisipasi warga masyarakat Dukuh Menanggal Surabaya dalam pilkada langsung kota Surabaya sesungguhnya sangat berkait erat dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya mereka. Baik mereka yang menyetujui ataupun yang menentang serta yang ragu-ragu terhadap pilkada langsung tersebut secara umum mereka ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda baik secara sosial, ekonomi ataupun budaya.

Mereka yang memiliki persepsi dan berpartisipasi positif, rata-rata berlatar belakang sosial yang mapan. Artinya mereka memiliki pendidikan yang cukup tinggi, interaksi dengan warga sangat baik karena kebanyakan mereka sudah menetap sangat lama/turun temurun. Status mereka dalam masyarakat cukup terpandang. Dari sisi keagamaan juga dapat dikategorikan sebagai penganut agama yang baik (pengamalan agamanya baik, bukan kaum abangan), Budaya mereka cenderung budaya kota (berwawasan luas meskipun terkesan agak individual). Dari sudut ekonomi mereka ini tergolong ekonomi mapan, sedikit yang berekonomi kurang mampu. Latar belakang ini memberikan mereka sebuah kesadaran yang cukup tinggi bahwa pemilukada langsung dapat memberi dampak positif kepada warga baik secara politik, ekonomis maupun sosial. Dengan demikian pemilukada langsung kota Surabaya mampu memberi nilai tambah kepada masyarakat Dukuh Menanggal.

Mereka yang memiliki bepersepsi dan berpartisipasi negative rata-rata berlatar belakang social ekonomi yang kurang mapan. Artinya, mereka ini rata-rata berpendidikan rendah, interaksi dengan warga masyarakat terbatas, status mereka dalam masyarakat kurang terpandang (penduduk biasa/penduduk musiman dan pada umumnya pendatang). Dari sisi keagamaan juga dapat dikategorikan sebagai penganut agama yang baik (pengamalan agamanya baik, bukan kaum abangan), Budaya mereka budaya pedesaan/agraris, sangat erat dalam kesatuan dan memiliki solidaritas yang tinggi.

Secara ekonomi kelompok ini tergolong berekonomi kurang mampu, menengah ke bawah. Hal ini dapat dilihat dari tempat usaha mereka yang tidak menetap/berpindah-pindah/musiman dengan barang dagangan yang terbatas. Namun mereka ini tergolong pekerja keras/rajin. Latar belakang ini sangat mewarnai dalam menentukan persepsi dan partisipasi mereka, mereka kurang setuju dengan pemilukada langsung.

Mereka yang memiliki persepsi dan partisipasi ragu-ragu terdiri dari campuran antara kelompok persepsi positif dan negative, baik secara social, ekonomi dan budaya. Mengapa mereka ragu-ragu ? Pertimbangan mereka cukup sederhana bahkan praktis, bahwa pemilukada langsung tidak memberi dampak apa-apa. Jika pemilukada langsung ternyata tidak berdampak positif bagi mereka, maka mereka ini bisa menjadi kelompok penentang. Perlu ditegaskan di sini bahwa kelompok ini memang merupakan kelompok semu, sehingga sewaktu-waktu bisa berubah baik positif ataupun negatif.

Satu lagi yang paling menarik dalam pilkada langsung kota Surabaya di Dukuh Menanggal adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara, yang hanya mencapai 48,4 %, tidak mencapai 50 %. Untuk mendiskusikan hal ini maka perlu diuraikan sebagai berikut:

1. Kaitan antara penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan masa kampanye. Pada waktu penetapan DPT, masyarakat Dukuh Menanggal sangat antusias untuk memberikan informasi/data secara valid. Hasilnya 96,9 % warga berpartisipasi. Ini merupakan bentuk partisipasi yang sangat tinggi. Namun ketika waktu kampanye tiba, ternyata hanya 2 dari 5 pasang cawali/wawali yang datang/berkampanye di Dukuh Menanggal. Padahal jadwal kampanye sudah diinformasikan secara terbuka. Artinya partisipasi yang tinggi dari warga ternyata tidak diimbangi oleh partisipasi yang tinggi dari peserta pilkada, maka dampaknya sudah dapat dipastikan yaitu rasa kecewa/kurang puas dan kurang percaya, bahkan apatis dari warga Dukuh Menanggal. Dampak negative ini terbukti pada waktu pemungutan suara, yaitu rendahnya partisipasi warga dalam pemungutan suara (kurang dari 50 %).

2. Kaitan antara masa kampanye dengan pemungutan suara. Terdapat benang merah yang menghubungkan antara masa kampanye dengan partisipasi warga dalam pemungutan suara. Dari lima pasang cawali dan wawali kota Surabaya ternyata hanya dua

pasang cawali/wawali yang berkampanye di Dukuh Menanggal. Dua pasang cawali dan wawali yang berkampanye di Dukuh Menanggal memperoleh suara terbanyak 1 dan 2. Artinya bahwa kampanye sebagai bentuk sosialisasi atau perkenalan diri kepada masyarakat sebagai calon pemilih mempunyai makna positif. Dua pasang cawali/wawali yang berkampanye di Dukuh Menanggal lebih dikenal oleh warga dibanding yang tidak berkampanye. Secara otomatis berdampak pada waktu pemungutan suara, dua pasangan tersebut menempati urutan 1 dan 2 di Kelurahan Dukuh Menanggal Surabaya.

3. Banyaknya massa mengambang, yang dapat dikategorikan dalam kelompok semu/golput. Kelompok ini tidak dapat menerima kelima cawali/wawali dengan beragam alasan. Apalagi tidak maksimalnya kampanye yang dilakukan di Dukuh Menanggal. Perasaan kecewa, tidak puas, karena hanya dua pasang cawali/wawali yang berkampanye membuat masyarakat skeptis. Dampaknya adalah rendahnya presentase warga yang ikut dalam pemungutan suara, kurang dari 50 %.

4. Lokasi Dukuh Menanggal yang berada di pinggiran kota Surabaya. Letak kawasan yang dipandang kurang strategis, kurang menarik bagi cawali/wawali, sehingga tidak semua cawali/wawali mau melakukan kampanye di wilayah tersebut. Padahal letak Dukuh Menanggal termasuk strategis, karena berdekatan dengan Kantor pemerintah(PU), Perumnas, Perbankan, kampus, dan sebagainya. Sosialisasi yang tidak maksimal berdampak pada partisipasi warga. Dengan kata lain wilayah ini agak terabaikan dalam proses pilkada langsung kota Surabaya.

V. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Keragaman latar belakang masyarakat Dukuh Menanggal Surabaya baik sosial, ekonomi maupun budaya membawa pengaruh yang beragam dalam menanggapi permasalahan yang mereka hadapi, termasuk

masalah persepsi dan partisipasi mereka dalam PILKADA Langsung kota Surabaya.

Persepsi dan partisipasi warga masyarakat Dukuh Menanggal dalam PILKADA Langsung kota Surabaya secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Kategori pertama, persepsi positif/setuju dengan dalam PILKADA Langsung kota Surabaya, maka partisipasi mereka cukup tinggi. Mereka yang memiliki persepsi dan partisipasi positif, rata-rata berlatar belakang social ekonomi mapan. Mereka memiliki pendidikan yang cukup tinggi, menetap lama/turun temurun, status mereka dalam masyarakat cukup terpancang dari sisi agama juga dapat dikategorikan sebagai penganut agama yang baik, budaya mereka cenderung budaya kota (berwawasan luas). Dari sudut ekonomi mereka ini tergolong ekonomi mapan, sedikit yang berekonomi kurang mampu.
2. Kategori kedua, persepsi negative/tidak setuju dengan dalam PILKADA Langsung kota Surabaya, maka bentuk partisipasinya sangat kecil atau tidak berpartisipasi bahkan menentang. Mereka rata-rata berlatar belakang social ekonomi yang kurang mapan. Berpendidikan rendah, mereka dalam masyarakat kurang terpancang (umumnya pendatang). Dari sisi keagamaan mereka ini kebanyakan sebagai penganut Islam yang baik. Budaya mereka budaya pedesaan /agraris, dengan kesatuan dan solidaritas yang tinggi. Secara ekonomi kelompok ini tergolong berekonomi kurang mampu, menengah ke bawah
3. Kategori ketiga adalah mereka yang ragu-ragu (antara setuju dan tidak setuju) dalam PILKADA Langsung kota Surabaya. Karena persepsi mereka ragu-ragu, maka partisipasi kelompok ini juga diragukan keseriusannya. Mereka terdiri dari campuran antara kelompok persepsi positif dan persepsi negatif, baik secara social, ekonomi dan budaya. Kelompok ini memang merupakan kelompok semu, sehingga sewaktu-waktu bisa berubah baik

positif ataupun negatif. Secara keagamaan mereka ini kebanyakan Islam KTP, atau sering disebut kelompok abangan/aboge.

B. Saran

1. Penelitian ini merupakan penelitian awal, oleh karena itu diperlukan penelitian lanjutan dalam rangka mengembangkan partisipasi aktif warga masyarakat dalam PILKADA Langsung kota Surabaya periode berikutnya.
2. Meskipun penelitian ini merupakan penelitian awal, namun hasil penelitian ini merupakan masukan yang penting untuk memperluas pandangan dalam perencanaan program sehingga dapat disusun rancangan kegiatan yang lebih tepat dan sesuai dengan latar belakang social ekonomi dan budaya warga masyarakat.
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperluas wawasan terutama memberi wawasan masukan yang berguna bagi penyusunan strategi pengembangan partisipasi masyarakat yang lebih tepat dalam rangka pengembangan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bigge, M.I., 1984, *Learning Theory for Teachers*, New York, N.Y.: Harper and Row Publishers.
- Bogdan, R.C, & Biklen, S.K. 1984, *Qualitative Research For Education*, Boston, Allyn and Bacon Inc.
- Cohen, Y.A, 1987, *The Shaping of Man's Mind: Adaptation of Imperatives of Culture*. Dalam M.L. Wax et al., *Anthropological Persepectives On Education*, New York, Basic Books Inc.
- Duverger, Mourice, 2001, *Sosiologi Politik*, Jakarta: Gramedia.

Goetz, J.P. & LeComte, M. D. 1984, *Ethnography And Qualitative Design In Educational Research*, New York, Academic Press Inc.

Van Manen, J. Dabbs, J. M. & Faulkner, R. R. 1984, *Varieties of Qualitative Research*, Beverly Hills, Sage Publication.

Knobler, N. 1971, *The Visual Dialogue: An Introduction To The Appreciation*, New York, Holt Rinehart and Winston.

**Penulis dosen FKIP UNIPA Surabaya.*

www.KPUKota-Surabaya.co.id diunduh
16/12/2011.

Miles and Huberman, 1984, *Qualitative Data Analysis A Sources of New Method*, Beverly Hills, Sage Publications.

McFee, J. K, 1970, *Preparation For Arts*, Belmont, Wadsworth Publishing Company Inc.

Patton, M.Q., 1985, *Qualitative Evaluation Method*, Beverly Hills, Sage Publications.

Raga Manan, Rafael, 2006, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Safrudin, www.blogjurnalistikonline, 2010.

Saiful Mujani, dkk., 2012, *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Mizan Publika.

Spradley, 1980, *Participant Observation*, New York, Holt Rinehart and Winston.

Sutopo, H.B., 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Metodologi Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya* Surakarta, UNS.

Undang – Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.